

Desain Sistem Informasi Perpustakaan Desa Dalam Rangka Mendukung Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Eka Wardhani Suprihatin

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulon Progo

E-mail: ekamind29@gmail.com

Diajukan: 16-01-2021; **Direview:** 02-02-2021; **Diterima:** 24-09-2021; **Direvisi:** 10-11-2021

Abstrak

Perpustakaan desa sebagai fasilitas penyedia bahan bacaan yang paling dekat dengan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, namun keberadaannya belum mendapatkan perhatian yang serius. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional RI mempunyai program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang memberikan pemahaman baru tentang keberadaan perpustakaan desa, agar lebih dikenal oleh masyarakat dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Perpustakaan desa membutuhkan adanya desain sistem informasi perpustakaan desa agar keberadaan perpustakaan tersebut tertata dengan baik sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Perpustakaan Nasional RI. Maka dari itu, diperlukan penelitian terkait desain sistem informasi untuk perpustakaan desa. Metode analisis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, artikel ini memberikan gambaran tentang kondisi perpustakaan desa saat ini yang masih menggunakan konsep perpustakaan konvensional dan gambaran desain informasi perpustakaan yang menjalankan program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan desa yang berbasis inklusi sosial tidak saja memberikan layanan peminjaman dan pengembalian buku, akan tetapi juga memberikan layanan kegiatan masyarakat yang berbasis TIK. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1.) Desain sistem informasi perpustakaan desa penting dibuat demi terwujudnya perpustakaan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat; 2.) Desain sistem informasi perpustakaan desa hendaknya dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan fasilitas ruangan yang cukup untuk variasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mendayagunakan koleksi perpustakaan tersebut sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat; 3.) Pemanfaatan TIK di perpustakaan lebih diarahkan pada kegiatan promosi dan pembuatan dokumentasi sebagai sumber untuk melakukan lobi pada pihak-pihak yang mendukung bagi pengembangan literasi dan kegiatan perpustakaan tersebut.

Kata Kunci: Desain Perpustakaan, Perpustakaan Desa, Inklusi Sosial

Abstract

The village library as a provider of reading material facilities closest to the community is very important, but its existence has not received serious attention. Therefore the National Library of Indonesia has a Social Inclusion-Based Library Transformation program which will provide a new understanding of the existence of village libraries, so that they are better known by the community and can be used properly. For this reason, it is necessary to design a village library information system so that the existence of the library is well organized in accordance with the standards set by the National Library of Indonesia. The analytical method used is descriptive qualitative with a literature study approach, this article provides an overview of the current condition of village libraries that still use conventional library concepts and an overview of library information designs that run social inclusion-based library programs. Social inclusion-based village libraries do not provide loan services and help books, but also provide ICT-based community activities. From the research, it can be concluded that: 1.) the rural library information system design is important to be developed, so that the library is able to fulfill people's need; 2.) the rural library information system design is important to be developed to be able to give enough facilities for the variations of people empowerment using the library collections; 3.) the implementation of ICT (Information and Communication Technology) in the library is more directed in the promotion and documentation activities to promote the literation development and library activities.

Keywords: Library Design, Rural Library, Social Inclusion

Pendahuluan

Perpustakaan desa merupakan jenis perpustakaan umum yang didirikan oleh pemerintah desa dan dibiayai menggunakan APBDDes. Perpustakaan ini didirikan dengan tujuan untuk melayani kebutuhan informasi dan mengembangkan kegiatan literasi dan budaya baca di lingkungan desa tersebut. Sebagai pusat belajar dan kegiatan literasi, perpustakaan desa hendaknya mempunyai desain khusus yang menunjang tugas pokok dan fungsinya tersebut. Namun kenyataan yang ada tidaklah demikian. Banyak perpustakaan desa yang penempatannya hanya asal-asalan saja. Meskipun dari Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) sudah membuat Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Desa, namun banyak Kepala Desa yang belum mengetahui hal ini. Apalagi keberadaan perpustakaan hanya sebagai unsur pelengkap dalam sebuah pemerintahan, hal ini sangat menyulitkan bagi perpustakaan untuk berkembang.

Budaya baca masyarakat Indonesia yang masih rendah menjadi salah satu isu strategis dari pembangunan nasional yang harus diselesaikan yang salah satunya dengan mengembangkan perpustakaan. Pentingnya keberadaan perpustakaan desa sebagai tumpuan dalam mengembangkan budaya baca masyarakat adalah karena perpustakaan desa mampu menjangkau pemustaka hingga ke level yang paling rendah di wilayah yang paling kecil. Wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh lautan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat dalam hal urusan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu keberadaan desa sangat membantu pemerintah dalam mengurus masyarakat termasuk dalam hal pengembangan budaya baca dan literasi di masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2018 ada 71.074 desa yang tersebar di seluruh wilayah negara Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2018). Oleh karena itu jika keberadaan perpustakaan desa ini dioptimalkan maka masalah budaya baca yang rendah akan dapat teratasi.

Tahun 2019 merupakan babak baru bagi perpustakaan umum di Indonesia karena Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melirik perpustakaan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah budaya literasi yang masih rendah. Hal ini dilanjutkan dengan adanya nota kesepahaman antara Bappenas dan Perpusnas yang isinya memprioritaskan literasi sebagai salah satu masalah yang harus diatasi untuk masalah kesejahteraan. Pada tahun ini, Bappenas bersama dengan Perpusnas berkomitmen menjalankan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai solusi dalam peningkatan budaya literasi. Dengan adanya literasi yang baik diharapkan masyarakat dapat menggunakan keterampilan literasi tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.

Pentingnya peran perpustakaan dalam peningkatan budaya literasi tersebut sayangnya baru mulai dipahami oleh para pemangku kepentingan di tingkat nasional. Untuk sosialisasi ke tingkat provinsi sampai dengan desa masih membutuhkan kerja keras. Berbagai pedoman tentang pengembangan perpustakaan sudah dibuat oleh Perpusnas namun masih diperlukan penjelasan yang lebih detail agar lebih mudah dipahami oleh pengelola perpustakaan desa secara langsung. Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah fisik bangunan perpustakaan. Hal ini penting karena perpustakaan desa biasanya mendapatkan alokasi ruangan seadanya tanpa menggunakan desain tata letak yang layak untuk sebuah perpustakaan. Oleh karena itu rancangan desain sistem informasi perpustakaan desa diperlukan sebagai upaya agar perpustakaan desa mempunyai performa yang menarik untuk dikunjungi dan keberadaannya merepresentasikan fungsi perpustakaan sebagai tempat belajar, diskusi ataupun rekreasi. Desain sistem informasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini difokuskan pada desain tata ruang secara fisik yang memudahkan pengguna dalam pencarian informasi di perpustakaan desa. Pembuatan rancangan desain sistem informasi yang diwujudkan dalam perencanaan tata letak ruang perpustakaan desa akan sangat membantu dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal untuk pemustaka.

Penelitian tentang tata ruang perpustakaan ini pernah dilakukan oleh Muhammad Azwar dan Agung Nugraha pada tahun 2016 dengan judul Manajemen Tata Ruang Perpustakaan Pesantren Madani Alaudin Pao-Pao Makasar. Penelitian tersebut mengambil subjek penelitian perpustakaan pesantren dan objek penelitian adalah perpustakaan desa karena ada hal baru yang harus diterapkan dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk perpustakaan desa, yaitu mewujudkan perpustakaan yang melayani kebutuhan pemustaka sekaligus mampu menjadi pusat belajar dan kegiatan untuk masyarakat sekitarnya (Nugraha & Azwar, 2016). Artikel tersebut memberikan gambaran tentang desain perpustakaan desa yang ideal baik menurut SNP maupun pengembangannya saat ini untuk mendukung program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Desain tata letak ruangan yang dibuat dapat digunakan oleh pengelola perpustakaan agar dapat menjalankan fungsi perpustakaan dengan baik serta bertujuan agar pemustaka merasa nyaman berkunjung dan memanfaatkan layanan perpustakaan.

Tinjauan Pustaka

Sumber tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Muslimin pada tahun 2018 tentang penumbuhan budaya literasi melalui peningkatan minat baca masyarakat desa. Dalam penelitian itu disebutkan bahwa untuk meningkatkan minat baca guna menumbuhkan budaya literasi dan melek huruf perlu dilakukan berbagai strategi program yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, seperti: (1) penyediaan sarana prasarana perpustakaan desa berbasis IT; (2) pelibatan mahasiswa KKN yang langsung tinggal di rumah penduduk sekaligus mengajar baca tulis selama dua sampai tiga bulan; dan (3) kerja sama dengan sekolah terdekat (Muslimin, 2018).

Dalam penelitian yang lain disebutkan bahwa minat baca masyarakat sekitar TBM timbul dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal lebih berpengaruh karena masyarakat cenderung harus selalu diajak, dibujuk, serta diberikan dorongan dari orang lain. Pelaksanaan kegiatan TBM berbasis teknologi informasi dilakukan melalui tahapan pengorganisasian, pengarahan, dan pembinaan. Dampak kegiatan TBM berbasis teknologi informasi dapat dilihat dari ranah kognitif (masyarakat memiliki pengetahuan baru yang selanjutnya diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari), dan ranah afektif (warga masyarakat memiliki sikap positif terhadap gerakan membaca buku minimal sepuluh menit melalui *games* di TBM). Kesimpulan penelitian tersebut adalah bahwa TBM telah meningkatkan kemampuan membaca masyarakat yang bermanfaat dalam menjalankan aktivitas hidup sehari-hari (Saifudin, 2016).

Berdasarkan kedua tinjauan pustaka ini dapat kita ketahui bahwasannya perpustakaan desa maupun perpustakaan komunitas mempunyai peran yang penting dalam peningkatan budaya literasi masyarakat. Namun, keberadaannya masih kurang mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan. Oleh karena itu perlu pendampingan dari pihak lain agar keberadaan mereka lebih diperhatikan. Perpustakaan desa adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender (Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan, 2016). Dalam pengelolaan perpustakaan desa ada standar yang digunakan yang dinamakan SNP. SNP adalah kependekan dari Standar Nasional Perpustakaan yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) selaku induk dari seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia. Standar ini dibuat berdasarkan jenis perpustakaan terdiri dari: SNP Perpustakaan Umum (perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa dan masyarakat), SNP Perpustakaan Khusus, SNP Perpustakaan Sekolah (SD, SMP, SMA) dan SNP

Perpustakaan Perguruan Tinggi. Masing-masing mempunyai ukuran sesuai dengan jenisnya masing-masing.

SNP Perpustakaan desa merupakan standar nasional perpustakaan yang ada di desa atau yang dikelola oleh masyarakat, ditetapkan oleh Perpustnas RI dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa Kelurahan. Pada pasal 2 disebutkan bahwa Standar Nasional Perpustakaan Desa mencakup:

1. Standar koleksi perpustakaan
Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya cetak dan atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan. Dihimpun, diolah dan dilayankan. Dalam hal ini standar koleksi meliputi jumlah koleksi, kemutakhiran koleksi, jenis koleksi, koleksi referensi, pengolahan koleksi, perawatan koleksi.
2. Standar sarana prasarana perpustakaan, meliputi gedung/ruangan, rak buku, sarana kerja, sarana TIK, dan fasilitas pendukung lainnya
3. Standar pelayanan perpustakaan, meliputi jam buka perpustakaan, jenis pelayanan, dan pola pelayanan
4. Standar tenaga perpustakaan, meliputi jumlah tenaga perpustakaan, kualifikasi kepala perpustakaan, kualifikasi staf perpustakaan, pembinaan tenaga perpustakaan.
5. Standar penyelenggaraan perpustakaan, meliputi SK pendirian perpustakaan, SK pengelola perpustakaan dan struktur organisasi perpustakaan,
6. Standar pengelolaan perpustakaan, meliputi perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan penganggaran perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI, 2017).

Perpustakaan desa dalam menjalankan fungsinya sebagai perpustakaan umum ikut bertanggung jawab atas peningkatan budaya literasi masyarakat. Menurut Asnawi ada tiga unsur pokok dalam perpustakaan desa yaitu: perpustakaan sebagai sebuah sarana, perpustakaan sebagai pendukung pendidikan, dan perpustakaan desa terintegrasi dengan pembangunan desa (Asnawi, 2015, p. 41). Oleh karena itu perpustakaan desa dalam menjalankan tugas pokoknya harus mempunyai strategi agar perpustakaan dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan pemustakanya atau yang disebut sebagai perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Sebagai salah satu dari sasaran program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial perpustakaan desa harus melakukan 4 strategi pengembangan perpustakaan sesuai dengan arahan Perpustnas, meliputi:

1. Peningkatan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Merupakan strategi pengembangan perpustakaan dengan penyediaan layanan internet dan komputer untuk pemustaka. Dalam layanan sumber informasi peran teknologi informasi ialah sebagai penunjang pelayanan tersebut karena jika pada era teknologi ini perpustakaan tidak bisa mengimbangi perkembangan teknologi, perpustakaan perlahan akan kehilangan peminatnya (Rahmawati, 2017, p. 132). Selain itu peningkatan layanan TIK juga dilakukan dengan mendesain tata letak perpustakaan sedemikian rupa sehingga pemustaka merasa nyaman, tidak merasa asing dan betah di perpustakaan. Konsep pengembangan TIK ini juga bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam penyediaan komputer dan internet sebagai sarana untuk mengakses informasi yang bermanfaat untuk pengembangan keterampilan.

2. Pelibatan Masyarakat

Merupakan strategi pengembangan perpustakaan dengan mengundang masyarakat untuk berkegiatan di perpustakaan baik menggunakan dana APBDes maupun kerja sama dengan pihak lain di luar perpustakaan yang mendukung kegiatan pengembangan literasi di wilayah tersebut (*library supporter*). Kegiatan pelibatan masyarakat ini dapat mendorong masyarakat terutama kaum perempuan dalam sektor ekonomi (Safira, 2019, p. 32).

3. Advokasi

Advokasi perpustakaan menjadi hal yang penting karena menurut undang-undang, perpustakaan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat (Feridha, 2020, p. 41). Strategi advokasi terdiri dari dua kegiatan yaitu lobi dan promosi. Lobi dilakukan oleh pihak desa untuk menarik pihak luar yang mau diajak bekerja sama mengembangkan perpustakaan, sedangkan promosi adalah upaya perpustakaan untuk memasarkan layanan dan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan desa tersebut.

4. Dokumentasi kegiatan

Strategi ini merupakan perekaman kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk catatan, foto maupun video sebagai data dari kegiatan yang dilakukan. Data ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi maupun bahan untuk melakukan advokasi (lobi dan promosi) pada pihak lain yang mempunyai hasrat untuk membantu pengembangan literasi di perpustakaan tersebut (Arcana, 2018, p. 48).

Penerapan desain perpustakaan desa sesuai dengan SNP disertai dengan penerapan strategi pengembangan perpustakaan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan budaya literasi di Indonesia. Budaya literasi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Adapun desain perpustakaan desa ini harus didasarkan pada kebutuhan dan keinginan para pengguna perpustakaan karena sebagai sektor pelayanan publik perpustakaan harus menjamin kepuasan pengguna atas produk yang ditawarkan (layanan). Hal ini sangat penting dilakukan mengingat perpustakaan desa sebagai pusat kegiatan masyarakat harus mampu memfasilitasi hal tersebut. Dengan kata lain bahwa perpustakaan desa harus mampu menciptakan sebuah “*makerspace*” untuk menampung ide kreatif dan kesenangan masyarakat di lingkungannya. *Makerspace* adalah sebuah ruang di mana orang berkumpul untuk berbagi pengetahuan, belajar bersama dengan bantuan teknologi dan peralatan yang lengkap (Rohmawati, 2016). Fasilitas ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat untuk saling berbagi info dan keterampilan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian desain sistem informasi perpustakaan desa ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif secara induktif. Analisis data secara induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian yang muncul dari keadaan umum, tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya (Moleong, 2014, p. 297). Penelitian ini menjelaskan desain sistem informasi perpustakaan desa dengan memberikan gambaran tata letak perpustakaan berdasarkan SNP untuk Perpustakaan Desa. Pengumpulan data untuk mendukung artikel ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap Perpustakaan Desa Swa Pustaka Kulon Progo dan juga telaah pustaka. Studi pustaka disebut juga kajian pustaka atau telaah dokumen yaitu suatu proses memahami dan menganalisis substansi/ isi (teori dan metodologi) kepustakaan berupa buku teks, artikel ilmiah, laporan ilmiah yang dilakukan secara kritis tentang topik tertentu (Wibowo, 2014, p. 47). Dengan melakukan telaah pustaka ini diharapkan akan mampu memberikan gambaran

sebuah desain sistem informasi perpustakaan desa yang mampu menampung kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan literasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Perpustakaan desa merupakan sarana yang praktis dan strategis dalam penyediaan bahan bacaan untuk masyarakat. Hal ini dikarenakan secara tanggung jawab struktural memang ada di bawah kewenangan Kepala Desa/Lurah dan berhak untuk mendapatkan alokasi anggaran APBDDes. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pasal 8 ayat 1 b disebutkan bahwa kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi: pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan. Dalam lampiran Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa tahun 2020, lebih rinci dijelaskan bahwa dana desa dapat dipergunakan untuk taman bacaan masyarakat, bangunan perpustakaan desa, buku/bahan bacaan, balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif, pembuatan galeri/museum desa, yang semuanya sangat berkaitan erat dengan keberadaan perpustakaan umum dalam hal ini perpustakaan desa dan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan sebuah desain sistem yang mampu menampung semua kebutuhan masyarakat akan pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan tersebut dalam sebuah desain sistem informasi perpustakaan. Perpustakaan dapat dijadikan alternatif untuk menampung semua kegiatan tersebut karena saat ini konsep pengembangan perpustakaan sudah tidak lagi konvensional sebagai penyedia dan pelayanan buku saja akan tetapi dikembangkan sebagai pusat kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan strategi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Mengingat kondisi masyarakat desa di Indonesia yang masih mengedepankan kehidupan sosial yang mengutamakan pertemuan antara warga dan suka berkumpul, maka perpustakaan hendaknya mempunyai gedung yang cukup memadai. Oleh karena itu desain sistem informasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dalam artikel ini akan dibagi menjadi dua bahasan yaitu fisik dan non fisik. Desain fisik meliputi desain gedung, tata letak perpustakaan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan desain non fisik meliputi strategi pengembangan perpustakaan agar keberadaan perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa tersebut. Desain fisik perpustakaan desa dapat didasarkan pada standar nasional perpustakaan desa meliputi koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. Sedangkan untuk desain non fisik berdasarkan pada strategi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu peningkatan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pelibatan masyarakat dan advokasi.

Dalam SNP Perpustakaan Desa ada 6 hal yang menjadi indikator terselenggaranya perpustakaan desa yaitu:

1. Koleksi Perpustakaan.

- a. Pengadaan koleksi

Dalam hal koleksi, sebuah perpustakaan desa hendaknya mempunyai koleksi buku cetak minimal 1.000 judul dengan jenis subjek yang berbeda dengan fokus subjek disesuaikan dengan mayoritas kebutuhan masyarakat setempat. Sebagai contoh perpustakaan desa yang berada di pinggir pantai akan lebih bermanfaat jika koleksi yang ada lebih diperbanyak dalam hal pertanian, pariwisata dan keterampilan. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang bernilai ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat lokal. Untuk

menunjang keberlanjutan perpustakaan maka koleksi harus selalu ditambah, dalam hal ini penambahan koleksi diupayakan melebihi 2% per tahunnya. Jenis koleksi utama adalah buku teks, meskipun sebuah perpustakaan juga harus menyediakan koleksi buku elektronik sebagai variasi jenis koleksi dan untuk mengikuti perkembangan TIK.

b. Pengolahan koleksi

Pengolahan koleksi dilakukan dengan cara sederhana meliputi kegiatan pencatatan/inventarisasi, klasifikasi dan deskripsi bibliografis. Apabila Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas memungkinkan, dapat dilakukan kegiatan otomasi perpustakaan dengan menggunakan aplikasi yang *open source* dan gratis seperti Slims ataupun Inlislite. Pemanfaatan TIK belum mengarah pada desain perpustakaan elektronik atau digital karena perpustakaan desa lebih fokus pada peningkatan keterampilan masyarakat, jadi masyarakat akan terlibat praktek langsung di perpustakaan melalui kegiatan yang dibuat bersumber pada bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan.

Perawatan koleksi dilakukan dengan penyampulan, menjaga kelembaban, pencahayaan dan kebersihan di lingkungan perpustakaan tersebut. Hal-hal kecil seperti makan dan minum boleh saja dilakukan oleh pengunjung perpustakaan asalkan tidak di area penyimpanan koleksi perpustakaan. Bisa di ruang baca, atau di halaman mengingat untuk perpustakaan desa sebaiknya mempunyai halaman luas untuk menarik masyarakat berkunjung ke perpustakaan dengan kegiatan-kegiatan yang menarik.

2. Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Sarana prasarana perpustakaan meliputi gedung, rak buku untuk koleksi, meja layanan, meja kerja petugas, katalog dan yang terpenting hendaknya setiap perpustakaan desa menyediakan sarana komputer dan internet untuk pemustaka. Hal ini sangat penting mengingat saat ini perkembangan TIK begitu pesat dan jaringan internet sangat dibutuhkan di semua lini kehidupan. Jadi sudah saatnya perpustakaan menyediakan layanan untuk memfasilitasi kebutuhan TIK masyarakat setempat. Untuk gedung perpustakaan desa dianjurkan mempunyai luas minimal 56 m² dengan pembagian area koleksi, layanan, ruang baca, dan ruang kerja. Jika memiliki ruangan atau gedung yang lebih luas maka akan lebih baik lagi karena mampu memberikan tempat untuk pengembangan kegiatan dan fasilitas lainnya bagi pemustaka perpustakaan.

3. Pelayanan Perpustakaan

Layanan di perpustakaan desa seharusnya dapat dilakukan secara fleksibel menyesuaikan dengan jam-jam sibuk masyarakat. Sebagaimana umumnya masyarakat desa biasanya sangat sibuk di pagi hari dan banyak waktu longgar di sore hingga malam hari. Untuk itu sebaiknya jam buka perpustakaan menyesuaikan hal ini dengan memberikan layanan siang-petang dengan jumlah jam layanan 6 jam per harinya. Sehingga masyarakat dapat menggunakan waktu luang mereka untuk sekedar istirahat sambil membaca atau bagi ibu-ibu bisa mengasuh anak sambil bermain di perpustakaan desa.

4. Tenaga Perpustakaan

Pengelola perpustakaan desa dalam SNP disyaratkan minimal berjumlah 2 orang dengan latar belakang pendidikan SLTA sederajat. Tenaga perpustakaan ini dapat memperoleh bimbingan dan pembinaan dari perpustakaan kabupaten sebagai pembina perpustakaan umum di wilayah tersebut. Dengan aktif mengikuti kegiatan di tingkat kabupaten maka pengelola perpustakaan akan mendapatkan banyak wawasan dan ilmu baru dalam pengembangan perpustakaan, sehingga

penyelenggaraan perpustakaan dapat dilakukan dengan baik dan pemanfaatannya dapat dioptimalkan.

5. Penyelenggaraan Perpustakaan

Proses penyelenggaraan perpustakaan dilakukan oleh pemerintah desa dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pendirian Perpustakaan Desa dan SK Pengelola Perpustakaan Desa. Dalam hal ini diperlukan komitmen dari Kepala Desa untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan perpustakaan desa dengan cara mengalokasikan anggaran desa (APBDes) untuk perpustakaan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pasal 8 ayat 1 b pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan. Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan ini ditujukan untuk minimal 3 komponen utama yaitu koleksi, pelayanan dan tenaga perpustakaan. Untuk hal-hal yang lain seperti kegiatan jika memungkinkan dapat dianggarkan melalui APBDes, jika memang tidak memungkinkan perpustakaan bisa bekerjasama dengan pihak lain sebagai donatur yang sering disebut sebagai *library supporter*.

6. Pengelolaan Perpustakaan

Komponen keenam dari SNP perpustakaan desa ini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan anggaran. Istilah lain dari pengelolaan perpustakaan adalah manajemen perpustakaan yang akan membuat pedoman agar penyelenggaraan perpustakaan dapat berjalan dengan baik. Perencanaan perpustakaan dapat dibuat dalam bentuk program kerja yang terbagi dalam 3 jenis yaitu jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Program kerja ini digunakan sebagai acuan dalam pencapaian target kinerja minimal perpustakaan tersebut, karena kondisi di desa terkadang tidak stabil atau sangat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Semua aspek pengelolaan itu harus dijalankan sebagaimana mestinya sehingga secara administrasi ada keteraturan dalam penyelenggaraan, sehingga memudahkan pengelola dalam melakukan evaluasi untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan keenam komponen pada SNP perpustakaan desa tersebut jika diikuti sesuai dengan petunjuk maka akan terwujud desain fisik untuk sebuah perpustakaan desa. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya banyak keinginan masyarakat yang perlu difasilitasi oleh perpustakaan. Untuk itu pengelola perpustakaan perlu melakukan strategi pengembangan perpustakaan yang akan menjadi desain non fisik dari perpustakaan tersebut. Desain ini didasarkan pada strategi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang cocok diterapkan untuk perpustakaan umum termasuk perpustakaan desa.

Selain memperhatikan desain fisik yang dapat dilihat dan digunakan secara langsung perpustakaan desa perlu mendesain perpustakaan secara non fisik. Desain non fisik yang dimaksudkan adalah merancang perpustakaan desa yang tidak hanya melakukan kegiatan konvensional peminjaman buku saja akan tetapi merancang perpustakaan desa sebagai pusat kegiatan dan belajar bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan strategi pengembangan perpustakaan yang meliputi 4 hal yaitu: peningkatan layanan TIK, pelibatan masyarakat, advokasi dan dokumentasi kegiatan. Hal ini sangat diperlukan mengingat pandangan masyarakat selama ini terhadap perpustakaan belum begitu baik apalagi kondisi di desa yang mementingkan unsur peningkatan pendapatan. Oleh karena itu perpustakaan perlu melakukan transformasi atau perubahan cara berpikir dan cara penyelenggaraan

perpustakaan dengan menyesuaikan dengan kondisi tersebut dengan mengubah perpustakaan yang semula dijalankan dengan sistem konvensional yaitu hanya memberikan layanan buku saja menjadi perpustakaan yang mampu memberikan fasilitas kebutuhan masyarakat yang berupa berbagai macam kegiatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Keberadaan perpustakaan secara fisik memang diperlukan karena tidak semua warga desa mempunyai fasilitas untuk melakukan kegiatan secara daring. Namun demikian penguasaan keterampilan terhadap penggunaan komputer dan internet sangat penting karena kebutuhan akan TIK saat ini sangat diperlukan oleh semua orang tanpa kecuali. Untuk itu strategi pengembangan perpustakaan yang pertama adalah peningkatan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Strategi ini dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain:

1. Penambahan sarana prasarana teknologi informasi secara fisik seperti pengadaan komputer, internet, penambahan *bandwith* (kecepatan internet), pengadaan *printer*, *scanner*.
2. Perubahan desain interior/eksterior perpustakaan, perubahan penataan ruang perpustakaan.
3. Pemberian layanan internet gratis kepada masyarakat pengguna perpustakaan

Kegiatan tersebut di atas dapat diagendakan secara rutin untuk menarik minat masyarakat datang ke perpustakaan dan membuat kegiatan perpustakaan semakin variatif dan inovatif.

Strategi yang kedua adalah pelibatan masyarakat meliputi kegiatan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tujuan utama pelibatan masyarakat adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam menggunakan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan ruang pada masyarakat untuk saling berbagi ilmu dan keterampilan. Dengan memperbanyak kegiatan pelibatan masyarakat diharapkan mereka merasa *familiar*, nyaman dan menemukan solusi permasalahan mereka di perpustakaan desa tersebut. Penerapan strategi pelibatan masyarakat dapat dilakukan dengan cara-cara seperti:

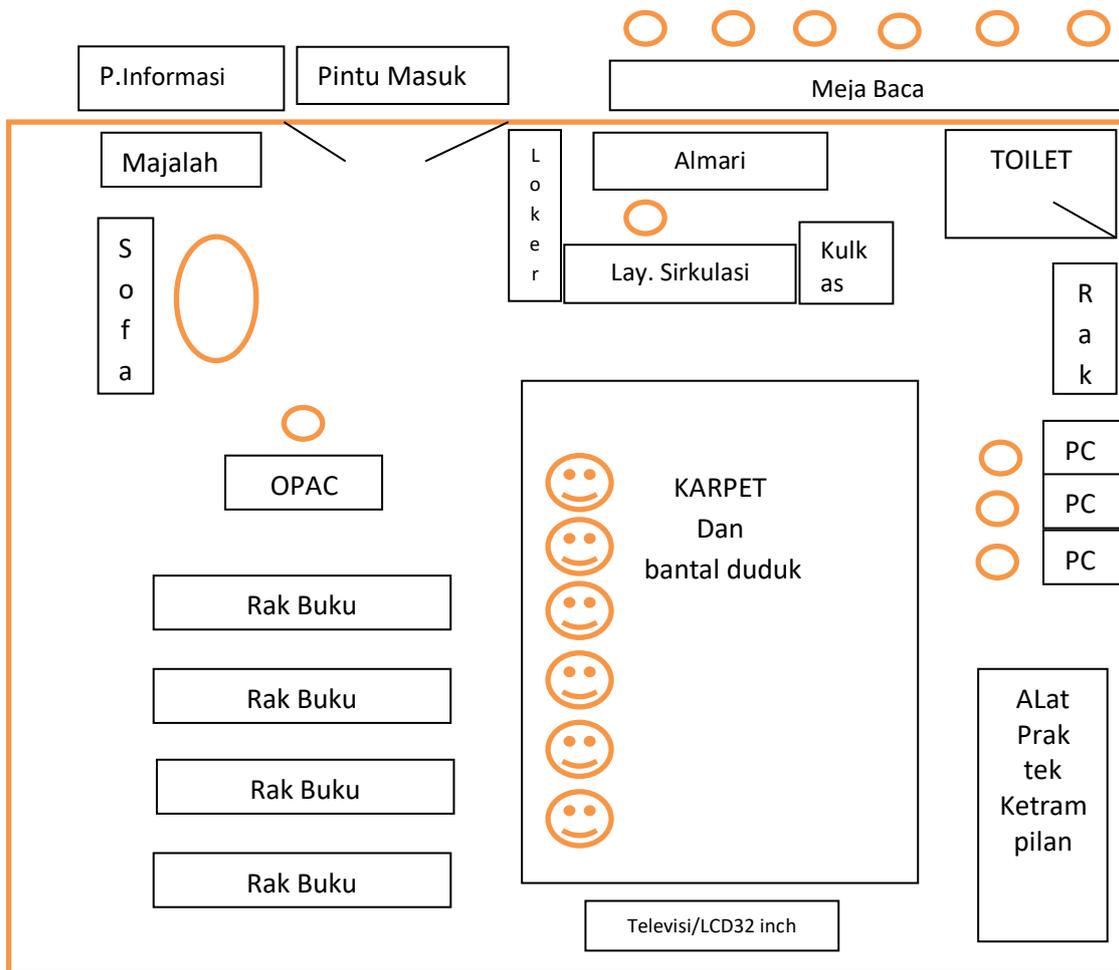
1. Pelatihan – pelatihan, seperti pelatihan komputer, pelatihan desain, pelatihan keterampilan, pelatihan menulis buku, pelatihan membuat puisi atau pun pelatihan lain yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Bedah buku, kegiatan ini bisa juga di kombinasi dengan pelatihan jika buku yang dibedah ada unsur praktiknya
3. Penyelenggaraan kegiatan seperti lomba-lomba atau pun pentas kesenian.

Semakin banyak kegiatan pelibatan masyarakat yang diselenggarakan oleh perpustakaan diharapkan mampu memberikan aktivitas positif yang menambah keterampilan untuk bekal hidup masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebagai contohnya adalah perpustakaan desa Patas di Kabupaten Buleleng. Selain memberikan layanan bahan pustaka, perpustakaan desa Patas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat desa Patas. Perpustakaan desa Patas menyediakan kursus Bahasa Inggris dan Tari kepada warga yang berminat menguasai keterampilan-keterampilan tersebut (Ariyani, 2017, p. 56). Dari kegiatan-kegiatan yang dimotori oleh perpustakaan tersebut diharapkan muncul dampak positif yang dirasakan oleh para pesertanya. Seperti yang dirasakan oleh Ni Wayan Sri Mentik yang terbebas dari kegiatan “mengemis” yang semula menjadi mata pencaharian karena mengikuti kegiatan pelatihan membuat dupa dan *mejejaitan* (merangkai janur untuk upacara) yang diselenggarakan oleh perpustakaan umum kabupaten Karangasem (Mentik, 2018, p. 25).

Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan TIK maupun pelibatan masyarakat tentu saja membutuhkan anggaran. Untuk itu perpustakaan desa perlu didesain untuk mendapatkan anggaran yang cukup dari desa yang bersangkutan. Namun kenyataan yang ada di lapangan tidaklah semudah yang

dibayangkan karena banyak sekali hal lain yang juga perlu dibiayai menggunakan dana desa tersebut. Oleh karena itu selain mempunyai anggaran dari desa yang biasanya tidak banyak, pengelola perpustakaan harus menggunakan daya kreativitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dengan dana minimal. Pengelola dapat melakukan lobi-lobi pada pihak-pihak yang mempunyai perhatian terhadap pengembangan perpustakaan seperti penerbit, toko buku, atau perusahaan besar lainnya yang mau menyalurkan dana CSR nya untuk pengembangan literasi. Dengan melakukan kerja sama tersebut diharapkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang literasi dapat lebih berkembang dan mampu meningkatkan budaya baca masyarakat.

Dengan menggabungkan lobi dan dokumentasi kegiatan yang dilakukan maka kita dapat mempromosikan perpustakaan kepada pihak-pihak tersebut guna mengajak mereka untuk bergabung dan intens mengembangkan literasi. Melalui komitmen dan kerja keras yang dilakukan tersebut diharapkan perpustakaan dapat memberikan kontribusi penting untuk peningkatan budaya literasi dan kesejahteraan masyarakat (Sulistyaningsih, 2018, p. 13). Peningkatan budaya literasi ini merupakan titik awal dari lepasnya jerat kemiskinan yang selama ini menjadi permasalahan utama bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu sarana prasarana untuk perpustakaan harus diperhatikan dan dilengkapi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Adapun desain tata letak gedung yang disarankan oleh penulis agar dapat mengakomodasi kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Tata Letak Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial

Gambar 1 adalah ilustrasi desain tata letak ruangan sebuah perpustakaan desa yang berukuran 7 x 8 m. Dengan segala keterbatasan, ruangan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi unsur-unsur sebuah perpustakaan. Ruangan/gedung seluas 56 m² ini terbagi atas: area ruang baca di luar, area lobi, area layanan, area komputer, toilet, area koleksi, area baca dan area “makerspace”. Pembagian area ini memungkinkan pengunjung dapat memudahkan pemustaka untuk menemukan apa yang mereka butuhkan ketika datang ke perpustakaan.

Secara umum ruangan perpustakaan ini memiliki jendela dan ventilasi yang cukup untuk menerangi ruangan, di teras depan sengaja disediakan meja dan kursi baca untuk pemustaka yang sekedar ingin mampir untuk duduk-duduk atau ingin membaca dengan suasana outdoor. Hal ini perlu selain menambah area baca juga sebagai ajang promosi perpustakaan, karena orang Indonesia itu suka “nongkrong” jadi harus diberikan fasilitas. Di sebelah kiri pintu masuk terpasang papan informasi yang dapat digunakan untuk menempel poster atau pengumuman-pengumuman yang perlu disebarluaskan untuk masyarakat.

Saat masuk ruangan perpustakaan yang pertama kali dijumpai adalah area lobi, penelusuran informasi dan area layanan dengan petugas yang siap menyambut kedatangan pemustaka. Pengunjung dapat menaruh tas atau barang bawaan lain di loker setinggi meja sirkulasi yang disediakan, setelah itu pemustaka dapat melakukan penelusuran katalog, menggunakan komputer, mencari buku atau sekedar membaca secara lesehan. Fasilitas area baca memang sengaja dibuat dengan sistem lesehan dengan

pertimbangan bahwa *lesehan* akan menampung lebih banyak orang dan efektif untuk pemustaka yang ingin duduk-duduk santai. Sesuatu akan dihampiri banyak orang manakala ada yang menjadikan nyaman atau senang ketika berada di lingkungan tersebut (Kalida, 2014, p. 110). Dibutuhkan kreatifitas dari pengelola untuk merancang tata ruang sehingga pengunjung perpustakaan mendapatkan fasilitas yang nyaman. Ruangan yang tertata rapi, desain interior dan eksterior yang ergonomis, dan sambutan petugas di ruangan depan akan membuat para pengunjung merasa nyaman dan selalu merindukan untuk datang ke perpustakaan.

Fasilitas komputer dan jaringan internet menjadi menu wajib untuk disediakan. Sebuah perpustakaan harus mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi karena hal ini merupakan alat bagi perpustakaan untuk penelusuran informasi terkini sekaligus sebagai daya tarik bagi masyarakat agar mengunjungi perpustakaan. Dengan menggunakan fasilitas ini masyarakat dapat mengunduh video tutorial untuk praktik di area "*makerspace*". Teknologi merupakan faktor penting dalam perencanaan pelayanan perpustakaan dan informasi, sebagai alat peningkatan layanan referensi dan informasi, akses jaringan katalog *online*, pengolahan buku, silang layan dan pengembangan bibliografi. Pemanfaatan teknologi informasi sangat relevan untuk memberikan layanan terbaik di perpustakaan demi memenuhi tingginya keinginan pemustaka akan informasi. Dengan adanya teknologi akan mengubah paradigma perpustakaan yang konvensional menuju yang lebih mutakhir (Fahrizandi, 2020, p. 74).

Sesuai dengan strategi desain perpustakaan non fisik yaitu pelibatan masyarakat area ini menjadi hal yang utama bagi perpustakaan desa demi terwujudnya peningkatan keterampilan masyarakat. Di area ini masyarakat dapat mengekspresikan pengetahuan yang dimiliki baik untuk dirinya sendiri maupun untuk dibagikan kepada masyarakat yang lain. Sebagai langkah efektif pengelola perpustakaan dapat mengatur hal ini dengan cara membuat analisis kebutuhan dan ketersediaan bahan maupun penerjemah. Setelah semua data dikumpulkan kemudian dapat dibuat jadwal untuk penyelenggaraan. Sebaiknya semua kegiatan atas dasar saling berbagi dan saling membutuhkan, sehingga tidak membebani pada anggaran perpustakaan desa. Dari masyarakat untuk masyarakat dibantu dengan fasilitas yang dimiliki oleh perpustakaan desa tersebut.

Untuk mempromosikan segala kegiatan di perpustakaan desa, pengelola dapat menggunakan media sosial seperti *Whatsapp*, *facebook* dan *IG* yang banyak dimiliki oleh kaum muda. Dengan cara ini pasti akan banyak masyarakat yang penasaran dengan kegiatan di perpustakaan dan tertarik untuk mengikutinya. Dokumentasi kegiatan dapat juga menggunakan testimoni dari masyarakat yang telah mengikuti kegiatan dan merasakan manfaatnya. Hal ini tentu saja akan menambah nilai manfaat perpustakaan di lingkungan desa tersebut.

Penerapan desain perpustakaan desa yang mendukung terwujudnya perpustakaan berbasis inklusi sosial akan membuat perpustakaan lebih menarik, rapi dan terawat sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakannya. Dengan adanya desain tersebut pustakawan dapat lebih bersemangat dalam meningkatkan minat baca karena dengan penyediaan fasilitas yang baik perpustakaan tidak lagi dianggap sekedar pelengkap saja akan tetapi memang harus diadakan, difasilitasi untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa desain sistem informasi perpustakaan desa sangat penting dibuat demi terwujudnya perpustakaan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pedoman yang digunakan terdapat dalam SNP Perpustakaan Desa dan Strategi Pengembangan perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang bersumber pada Perpusnas RI. Desain sistem informasi perpustakaan desa hendaknya dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan

fasilitas ruangan yang cukup untuk variasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mendayagunakan koleksi perpustakaan tersebut sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemanfaatan TIK di perpustakaan lebih diarahkan pada kegiatan promosi dan pembuatan dokumentasi sebagai sumber untuk melakukan lobi pada pihak-pihak yang mendukung bagi pengembangan literasi dan kegiatan perpustakaan tersebut.

Daftar Pustaka

- Arcana, P.F. (Ed.). (2018). *Panduan transformasi perpustakaan yang berkelanjutan*. Coca Cola Foundation Indonesia.
- Ariyani, L. P. S. (2017). Peran perpustakaan umum bagi masyarakat : Studi kasus perpustakaan umum di Bali. *Jurnal Acarya Pustaka*, 3(2).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/AP/article/download/13059/8251>
- Asnawi. (2015). Perpustakaan desa sebagai sumber layanan informasi utama. *Media Pustakawan*, 22(3), 40–46. <http://ejournal.perpusnas.go.id/mp/article/download/211/203>
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Jumlah desa/kelurahan menurut provinsi dan letak geografi 2003 – 2018*. Agustus. [https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/18 00:00:00/906/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi-dan-letak-geografi-2003---2018.html](https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/18%2000:00:00/906/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi-dan-letak-geografi-2003---2018.html)
- Fahrizandi. (2020). Pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan. *Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 4(1), 64–75.
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/TI/article/download/1160/846>
- Feridha, Y. (2020). Strategi public realtions advokasi Perpustakaan Perpuseru. *Communications*, 2(2), 40–60. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.21009/Communications.2.2.3>
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan, (2016). www.perpusnas.go.id
- Kalida, M. (2014). *Gerakan literasi mencerdaskan negeri* (Ed. 1 Cet.). Aswaja Presindo.
- Mentik, N. W. S. (2018). Melawan kebiasaan mengemis. In Fajar Putu Arcana (Ed.), *Meraih Asa Lewat Literasi: Kisah Inspiratif Perpuseru*. (ed. 1, pp. 45–50). Coca Cola Foundation Indonesia.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif* (ed. rev). Remaja Rosdakarta.
- Muslimin. (2018). Penumbuhan budaya literasi melalui peningkatan minat baca masyarakat desa. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, XXXVII(1), 107–118.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/download/17141/pdf>
- Nugraha, A. R., & Azwar, M. (2016). Manajemen tata ruang perpustakaan pesatren Madani Alaudin Pao-Pao Makasar. *Jurnal Al Maktabah*, 15, 57–70.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34435/2/4714-11322-1-SM.pdf>
- Rahmawati, N. A. (2017). Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan sumber informasi di perpustakaan. *Libria*, 9(2), 125–132. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/libria/article/download/2390/1732>
- Rohmawati, A. (2016). Implementasi makerspace di perpustakaan Kota Yogyakarta. *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 4(2), 163–166.
<https://doi.org/10.24252/kah.v4i26>
- Safira, F. (2019). Peran perpustakaan dalam pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan umum Kabupaten Malang. *Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca*, 35(1), 23–32.
<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jkdmm/article/view/JKDMMV35N1%2C023-032/pdf>
- Saifudin, A. (2016). Menumbuhkan minat baca masyarakat melalui taman bacaan masyarakat berbasis teknologi informasi. *Jurnal Kwangsan*, 4(1), 43–45.

<https://jurnalkwangsan.kemdikbud.go.id/index.php/jurnalkwangsan/article/view/34>

- Sulistyaningsih, E. (2018). Pengantar 1. In Putu Fajar Arcana (Ed.), *Meraih Asa Lewat Literasi: Kisah Inspiratif Perpuseru*. (p. 13). Coca Cola Foundation Indonesia.
- Wibowo, A. (2014). *Metodologi penelitian praktis*. Raja Grafindo Persada.